

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tema dari penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *stakeholder* dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di negara Indonesia, Pakistan dan India. *Corporate Social Responsibility* merupakan komponen integral dari operasi perusahaan dimana secara sukarela memberikan kontribusi untuk lingkungan dalam hal investasi, ekonomi, lingkungan, etika dan sosial (Kanji dan Chopra, 2010).

Pemerintah Indonesia secara formal telah mengatur pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pelaporannya bagi seluruh perseroan terbatas. Aturan hukum yang mengatur pelaksanaan CSR di Indonesia adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dimana CSR merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Menurut UU tersebut pengungkapan CSR harus dilakukan oleh perusahaan yang aktivitas operasinya secara langsung terkait dengan sumber daya alam. Terdapat pula Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pasal 15 dan 34 disebutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan CSR akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin kegiatan.

Pengungkapan CSR juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan perseroan terbatas. Peraturan lain tentang CSR di Indonesia dikuatkan dengan Keputusan Bapepam-LK KEP-431/BL/2012 yang menyatakan bahwa laporan tahunan wajib memuat tanggung jawab sosial perusahaan.

Di negara India, regulasi mengenai CSR diatur pada *Companies Act* 2013 ayat 135 yang dikeluarkan oleh *Ministry of Companies Affairs* India yang berisi perusahaan wajib mengeluarkan minimal 2% dari laba bersih mereka untuk aktivitas CSR. Peraturan ini berlaku di India mulai tahun 2014 dan perusahaan diminta untuk membentuk komite CSR yang terdiri dari anggota dewan direksi dan minimum satu orang direktur independen.

Di Pakistan pelaksanaan CSR masih dalam tahap awal karena belum ada peraturan dari pemerintah terkait dengan aktivitas CSR sehingga masih bersifat sukarela. Pemerintah Pakistan pada tahun 2002 mengeluarkan *The 2002 Trade Policy* agar industri yang ada di Pakistan setara dengan standar internasional. Sehingga Pakistan harus berusaha mencari cara untuk dapat mengadopsi CSR. Latar belakang Pakistan mulai mengadopsi CSR adalah kasus Iqbal Masih, yakni seorang anak yang dibunuh karena aksinya menentang perbudakan anak di Pakistan. Kasus ini mendapat sorotan dunia, sehingga pada tahun 1990-an sebagai dampak dari kasus Iqbal Masih tersebut industri terbesar di Pakistan yakni industri karpet mengalami kerugian milyaran dolar. Setelah adanya kasus tersebut perusahaan di Pakistan harus memenuhi permintaan pembeli internasional terkait pelaporan CSR (Khan et al, 2013).

Pelaksanaan CSR dengan baik baru dilakukan oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar. Pakistan adalah kasus yang unik untuk masalah CSR karena negara ini mengalami berbagai masalah nasional seperti lemahnya perekonomian, politik yang tidak stabil, kerusuhan, korupsi merajalela, defisit energi, terorisme dan kerangka regulasi yang kurang memadai (Sajjad dan Eweje, 2014). Permasalahan yang terjadi di negara Pakistan salah satunya adalah mempekerjakan anak dibawah umur. Dilansir dari www.dunyanews.tv Pakistan menempati urutan ketiga untuk negara yang mempekerjakan anak di bawah umur menurut survei yang dilakukan oleh *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2014.

Di India dan Indonesia meskipun CSR telah memiliki peraturan tersendiri, kasus yang terjadi terkait CSR tetap saja ada. Kasus yang terjadi di India dilakukan oleh Coca Cola Company yang diberhentikan kegiatan operasinya karena telah menyebabkan polusi di sekitar pabrik. Kerusakan atau polusi yang ditimbulkan adalah terkontaminasinya air tanah dan tanah pertanian warga sekitar karena limbah cair yang tidak diolah dengan baik ketika dibuang. Perusahaan tersebut telah diperingatkan oleh warga sekitar, aktivis lingkungan bahkan oleh badan pengendali lingkungan setempat namun respon sehingga tindakan penghentian operasi pabrik dilakukan (www.taipeitimes.com, 2016). Kasus lain yang terjadi di India adalah pelanggaran HAM oleh anak perusahaan Tata Group yaitu Tata Global Beverages. Perusahaan ini diduga melakukan eksploitasi tenaga kerja dan mempekerjakan anak dibawah umur.

Di Indonesia juga terdapat banyak kasus terkait dengan CSR. Sebagai contoh adalah pencemaran air oleh PT Holcim di Tuban pada tahun 2012, pencemaran udara oleh PT Gudang Garam di Kediri pada tahun 2010, kasus pencemaran air oleh mitra PT Timah pada tahun 2011 di Bangka, kasus lumpur panas Sidoarjo yang disebabkan oleh gagalnya prosedur pengeboran minyak oleh PT Lapindo Brantas pada tahun 2008, kasus minyak tumpah di Dumai oleh PT Kreasi Jaya pada tahun 2016. Kasus lain yang terjadi pada perusahaan Indonesia dilakukan oleh anak perusahaan PT Indofood yaitu PT PP London Sumatra. Pelanggaran yang dilakukan adalah perusahaan ini mempekerjakan anak di bawah umur, pelanggaran keselamatan dan kesehatan pegawai, intimidasi serta rendahnya upah yang tidak memadai (www.eco-business.com, 2016).

Kasus lain yang menyinggung masalah CSR perusahaan di Indonesia antara lain PT KHT-II, PT ISIT dan PT FST yang terbukti sengaja membuang limbah sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan di sekitar lokasi di kecamatan Rancalek, kabupaten Bandung. Beban pencemaran air sudah melebihi daya tampung Sungai Cikining yang berhulu di Cikeruh di Kabupaten Bandung (<http://industri.bisnis.com>, 2016). Adapun kasus lain yang melibatkan perusahaan manufaktur, yakni PT Tjiwi Kimia. Pada awal tahun 2014, masyarakat di sekitar pabrik Tjiwi Kimia mulai resah akibat pencemaran dan kerusakan sungai. Hal ini diakibatkan adanya pembuangan limbah cair yang melebihi ambang baku mutu serta ditemukannya zat ammonia (NH_3) yang cukup tinggi pada hilir *outlet* PT Tjiwi Kimia di daerah Balongbendo. Akibat pencemaran ini menyebabkan adanya bau tak sedap serta gagal panen ikan yang dialami oleh warga, seperti di Desa

Jeruk Legi, Desa Penambangan, Desa Bakungsukodani dan Desa Tanjungsari (<http://mongabay.co.id>, 2016).

Contoh-contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa perusahaan seharusnya tidak hanya mementingkan untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan *stakeholder*. Tindakan yang kurang terpuji yang dilakukan oleh perusahaan akan berimbas pada perusahaan itu sendiri, citra perusahaan akan menjadi buruk bahkan operasi perusahaan dapat dihentikan. Aktivitas CSR harus diperhatikan selain tujuan perusahaan yang ingin memperoleh keuntungan perusahaan juga harus dapat menjaga hubungan yang baik dengan para *stakeholder*.

Penelitian mengenai *Corporate Social Responsibility* masih harus terus dilakukan karena pelaporan CSR merepresentasikan pengungkapan informasi tambahan diluar pengungkapan informasi keuangan, sehingga peneliti-peneliti di bidang akuntansi tertarik meneliti lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana peran pengungkapan CSR ini dalam penilaian perusahaan (Moser dan Martin, 2012). Terlebih pada era globalisasi sekarang ini kegiatan perekonomian lebih terintegrasi sehingga perusahaan juga mengalami tekanan untuk mengungkapkan informasi CSR mereka (Hooghiemstra, 2000). Sembiring (2005) menyatakan bahwa informasi yang relevan dan andal memungkinkan investor mengambil keputusan sehingga hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Dhaliwal (2012) menyatakan bahwa aktivitas CSR merupakan respon atas permintaan para pemangku kepentingan, sehingga pengungkapan ini menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk membantu

investor maupun calon investor dalam *forecasting* sehingga eror yang terjadi juga dapat diminimalisasi. Selain dari sisi tersebut, CSR mampu meningkatkan reputasi perusahaan karena akan berdampak pada kinerja perusahaan. CSR juga mampu menjaga keselarasan tujuan antara nilai sosial melalui aktivitas CSR dan norma sosial.

Pengungkapan CSR dapat didefinisikan sebagai tambahan informasi nonfinansial terkait interaksi perusahaan dengan lingkungannya yang dinyatakan atau dilampirkan dalam laporan keuangan atau dengan laporan terpisah (Hackston dan Milne, 1996). Pengungkapan CSR termasuk di dalamnya adalah informasi lingkungan fisik perusahaan, energi, manajemen sumber daya manusia dan tanggung jawab produk dan terkait tentang bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar dalam perusahaan. Gray et al (2001) menyatakan bahwa pengungkapan CSR dapat diartikan sebagai bagian informasi yang terkait dengan aktivitas perusahaan, aspirasi masyarakat dan citra publik terkait lingkungan, karyawan, konsumen, penggunaan energi, kesempatan kerja, perdagangan yang adil dan lainnya. Pengungkapan CSR dapat dilampirkan selain pada laporan keuangan dapat dilampirkan melalui iklan dan *booklet*.

Penelitian terdahulu tentang topik utama di negara India dilakukan oleh Muttakin dan Subramaniam (2013). Penelitian ini menguji apakah struktur kepemilikan saham perusahaan dan karakteristik perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan yang terdaftar pada *Bombay Stock Exchange* pada tahun 2007-2011. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan direktur independen berpengaruh positif

terhadap pengungkapan CSR, sedangkan CEO *duality* memiliki pengaruh negatif dengan pengungkapan CSR. Penelitian lain di India mengenai pengaruh *stakeholder* terhadap CSR dilakukan oleh Mishra dan Suar (2010) dan hasilnya karyawan, pelanggan, investor, masyarakat, lingkungan dan *supplier* berpengaruh terhadap CSR di perusahaan India.

Penelitian mengenai pengungkapan CSR di Indonesia dilakukan oleh Gunawan (2015) untuk menguji pengaruh *stakeholder* dan motivasi pengungkapan sosial pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan hasilnya masyarakat adalah kelompok pemangku kepentingan yang paling mempengaruhi pengungkapan sosial perusahaan pada laporan keuangan. Siregar dan Bahtiar (2010) meneliti pengaruh dari ukuran dewan direksi, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap pelaporan CSR pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pelaporan CSR.

Di Pakistan penelitian tentang pengungkapan CSR dilakukan oleh Lone, Ali dan Khan (2016) pada 50 perusahaan di Pakistan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa direktur independen, direktur wanita dan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sharif dan Rashid (2013) meneliti pengaruh elemen tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan pada tahun 2005-2010 dan hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa direktur non-eksekutif berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Penelitian tentang CSR di Pakistan dilakukan oleh Sajjad

dan Eweje (2014) yang hasilnya menyatakan bahwa hanya perusahaan besar dan multinasional yang telah melaksanakan CSR dengan baik, sedangkan perusahaan kecil dan menengah memang telah melaksanakan CSR namun terbatas pada permintaan pelanggan dari luar negeri.

Berdasarkan pemikiran di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan pengungkapan CSR dan menguji pengaruh *stakeholder* terhadap pengungkapan CSR di Indonesia, Pakistan dan India. Alasan untuk memilih negara Indonesia, Pakistan dan India adalah ketiga negara tersebut termasuk dalam negara yang memiliki populasi terbanyak di dunia, Indonesia dengan 258.316.051 jiwa atau 3,51% dari total populasi dunia, Pakistan sebanyak 201.995.540 jiwa atau 2,74% dari total populasi dunia, dan India sebanyak 1.266.883.598 jiwa atau 17,23% dari total populasi dunia. Selain itu, ketiga negara tersebut termasuk dalam kategori negara berkembang (www.census.gov, 2016).

Sebagaimana negara berkembang pada umumnya kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia lebih besar, minimnya kualitas pendidikan, masalah lingkungan, kemiskinan, mempekerjakan anak dibawah umur, tenaga kerja yang tidak terampil yang dapat menyebabkan eksploitasi pekerja (Lund-Thomsen, 2004). Semua masalah ini seharusnya dapat terselesaikan apabila aktivitas CSR perusahaan dilaksanakan dan bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan kondisi yang lebih baik.